



## Analisis Kebijakan Laku Pandai Terhadap Pengembangan Ekonomi Lokal di Sumatera Barat

Robi Eka Putra, Roni Ekha Putera, Desna Aromatica

Universitas Andalas, Limau Manis, Pauh, Kota Padang, Sumatera Barat 25175, Indonesia

### ARTICLE INFORMATION

Received: March 08, 2023  
Revised: Mei 28, 2023  
Available online: Juni 30, 2023

### KEYWORDS

BRI Link Agents, Local Economy, Smart Practices, Policy, Financial Inclusion.

### CORRESPONDENCE

Name: Robi Eka Putra  
E-mail: [robiekaputradarnius@gmail.com](mailto:robiekaputradarnius@gmail.com)

### A B S T R A C T

The Laku Pandai policy that has been issued by the Government is expected to increase the level of financial inclusion and literacy in Indonesia. However, not many realize that the Laku Pandai policy also has a further impact on local economic development in the region. Therefore, this study aims to analyze Laku Pandai's policy on local economic development in West Sumatra. This study was designed using a qualitative method with a descriptive approach. The source of the data used is from interviews with Laku Pandai agents, in this case BRILink agents in Padang City and Solok Regency as representatives of urban, sub-urban and rural areas in West Sumatra. The results show that the Laku Pandai policy issued by the government has an influence on local economic development, especially in West Sumatra. This can be seen from the important role of local economic development that can be seen after the implementation of the BRILink Agent began in 2016. Important roles that can be seen and felt such as increasing business opportunities, employment, business retention, economic diversification, self-sufficiency, increasing the tax base from the world business and society, quality of life, recognition of local products, and increased competitiveness. All of these important roles are certainly not only felt by BRILink agents, but also by all parties and layers in the area where the agent is located.

### PENDAHULUAN

Pertumbuhan ekonomi merupakan suatu gambaran yang dapat menentukan keberhasilan pembangunan, dihasilkan melalui kebijakan dan kepemimpinan sebuah negara. Salah satu faktor utama dalam mengklasifikasikan bahwa negara tersebut masuk dalam kategori negara maju atau negara yang masih berkembang adalah pertumbuhan ekonominya (Kurniawati & Sugiyanto, 2021). Jika pertumbuhan ekonomi dihubungkan dengan struktur keuangan suatu negara, pada jangka pendek sebuah negara penganut sistem keuangan yang berbasis pada sistem bank (bank based) memiliki pertumbuhan ekonomi yang lebih baik dalam hal mobilisasi tabungan dan alokasi modal dibandingkan dengan negara yang menganut sistem keuangan yang berbasis pasar (market based). Akan tetapi, positifnya adalah negara yang dengan sistem keuangan market based memiliki sistem pelayanan keuangan yang dapat mendorong inovasi dan pertumbuhan ekonomi jangka panjang, selain itu juga terdapat hubungan positif antara fungsi sistem keuangan dengan pertumbuhan ekonomi dalam jangka panjang (Supartoyo et al., 2018). Oleh sebab itu, Frensidy (2021) menyimpulkan bahwa sistem keuangan yang terdapat di setiap negara memiliki kelebihannya masing-masing dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Lestari et al. (2021) menyebutkan bahwa secara makro salah satu faktor penentu keberhasilan pelaksanaan pembangunan secara makro di suatu negara adalah pertumbuhan ekonomi. Meskipun demikian, faktor tersebut belum dapat mencerminkan kehidupan individu masyarakat karena masih merupakan indikator yang bersifat umum.

Proses pertumbuhan ekonomi di Indonesia dapat ditinjau dari dua sisi. Pertama proses pertumbuhan ekonomi melalui sektor usaha dan pertumbuhan ekonomi melalui kontribusi wilayah administrasi yang mendasarinya. Pendekatan ini menjelaskan besarnya perubahan ekonomi yang terjadi di suatu negara secara tidak langsung. Teori pembangunan ekonomi yang dikemukakan oleh Arthur Lewis membahas tentang proses

pembangunan ekonomi yang berlangsung di pedesaan dan perkotaan. Di sisi lain, teori ekonomi Rostow menyatakan bahwa pembangunan ekonomi serta proses transformasi masyarakat tradisional menjadi masyarakat modern, merupakan proses multifaset (Lestari et al., 2021).

Hampir seluruh masyarakat di Indonesia telah menggunakan layanan keuangan yang disediakan oleh negara, khususnya jasa perbankan. Berbagai jasa keuangan yang ditawarkan oleh bank umum dimanfaatkan oleh masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidup, seperti hunian tempat tinggal, kepemilikan kendaraan bermotor, tabungan, hingga berbagai produk investasi yang ditawarkan. Peran perbankan semakin penting karena sebagai lembaga intermediasi, maka perbankan diharapkan dapat terus memberikan layanan yang baik serta terjangkau oleh masyarakat. Dengan semakin berkembangnya teknologi informasi, kebutuhan dan harapan masyarakat juga semakin meningkat. Akan tetapi, Otoritas Jasa Keuangan (2021) menyebutkan bahwa hal tersebut masih belum maksimal karena indeks inklusi keuangan masih di 76,19% berdasarkan Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan, dengan arti bahwa pada umumnya masyarakat Indonesia belum memahami dengan baik karakteristik produk dan jasa keuangan yang dilayani Bank (OJK, 2021).

Berbagai faktor yang melatarbelakangi masyarakat Indonesia belum memanfaatkan layanan perbankan secara maksimal dapat dilihat dari penyedia jasa (supply) dan masyarakat (demand). Dapat dicontohkan dengan adanya hambatan harga (price affordability), hambatan informasi (ignorance), hambatan desain produk (propriate product), dan hambatan saluran yang tidak memanfaatkan layanan perbankan yang jelas (cara yang tepat). Selain itu, masyarakat tidak menggunakan layanan perbankan karena terbatasnya akses ke bank, kekhawatiran tentang biaya administrasi, dan persyaratan yang dianggap kompleks. Fakta tersebut mendorong Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengembangkan program-program yang bertujuan untuk

menyerap dana masyarakat yang masih tersedia di luar perbankan secara optimal (Setiyono & Suharti, 2021).

Selanjutnya, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melalui survei yang telah dilakukan menemukan bahwa potensi dana masyarakat Indonesia yang berada di luar sistem perbankan masih tergolong besar. Selain itu, ditemukan juga fakta bahwa potensi sumber daya ekonomi masih belum terserap secara optimal di Indonesia. Hal ini terlihat dari total 250 juta masyarakat Indonesia, tingkat literasi keuangan baru menyentuh angka 29,70%. Di sisi lain, tingkat inklusi keuangan hanya sebesar 67,80%. Hal ini berarti bahwa masih ada 80 juta orang yang tidak menggunakan layanan jasa keuangan perbankan di Indonesia.

Pemerintah telah cukup sering mendorong kesadaran dan keikutsertaan masyarakat dalam memanfaatkan layanan penyedia jasa keuangan seperti perbankan. Akan tetapi, dengan ketersebaran wilayah di Indonesia yang sangat luas hingga daerah pelosok, maka belum semua masyarakat di Indonesia telah merasakan kemudahan jangkauan jasa perbankan. Dengan demikian, diperlukan segala upaya baik dari pemerintah maupun lembaga keuangan yang bersangkutan untuk dapat meningkatkan akses masyarakat terhadap jasa keuangan. Salah satu upaya tersebut adalah dengan pengenalan kebijakan-kebijakan keuangan inklusif melalui Strategi Nasional Keuangan Inklusif (SNKI).

SNKI merupakan kelanjutan dari kerjasama dan sinergi yang signifikan antara pemerintah dengan pihak terkait (Bank Indonesia dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bersama perbankan di Indonesia) dalam menanggapi kenyataan terkait banyaknya penduduk di Indonesia yang belum memiliki keterjangkauan atas layanan keuangan modern (OJK, 2021). Dalam rangka peningkatan keterjangkauan layanan keuangan oleh masyarakat luas, pemerintah telah meluncurkan kebijakan inklusi keuangan melalui program branchless banking. Branchless banking merupakan bertukr kebaruan dan inovasi layanan perbankan dengan memberikan pelayanan di luar kantor cabang. Kegiatan tersebut dilakukan dengan mendorong keterlibatan agen serta memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk mengirimkan rincian transaksi kepada bank dan masyarakat untuk akuntabilitas (Aster Kusumawati, 2015).

Inklusi keuangan merupakan suatu istilah untuk mewakili keterjangkauan layanan keuangan oleh masyarakat umum, terutama bagi mereka yang tidak terpapar layanan keuangan untuk dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat (OJK, 2016). Tujuan penerapan inklusi keuangan adalah agar masyarakat lebih mudah dalam mengakses layanan perbankan, meskipun tanpa bank, melainkan melalui agen. Selain itu, kebijakan inklusi keuangan diharapkan dapat menjadi solusi masyarakat yang kurang tersentuh jasa keuangan yang disebabkan oleh tantangan jarak dan geografi (Frensidy, 2021)

Pemerintah mencanangkan program Layanan Keuangan Digital dan Layanan Keuangan Tanpa Kantor dalam Rangka Keuangan Inklusif (Laku Pandai) melalui BI dan OJK serta jasa perbankan di Indonesia. Hal tersebut bertujuan untuk menyukseskan kebijakan inklusi keuangan dalam memaksimalkan akses jasa keuangan oleh masyarakat. Laku Pandai adalah sebuah program yang diluncurkan oleh OJK dalam rangka pemberian layanan keuangan melalui kerjasama dengan pihak lain (agen bank) dengan ditunjang sarana teknologi dan informasi (OJK, 2016). Laku Pandai memberikan fasilitas agar masyarakat dapat melakukan transaksi perbankan tanpa mengunjungi kantor bank. Sebaliknya, bank dapat mengajak

agen yang berasal dari masyarakat dengan syarat tertentu sebagai perpanjangan untuk melayani transaksi bank kepada masyarakat yang membutuhkan.

Laku Pandai pada awalnya diluncurkan sebagai jawaban untuk menyediakan pelayanan yang optimal khusus untuk orang-orang yang belum mengetahui, memanfaatkan, atau memperoleh jasa perbankan atau jasa keuangan lain yang disebabkan oleh jarak domisili atau persyaratan yang dinilai mempersulit. Tujuan diluncurkannya program Laku Pandai ialah agar dapat mendorong pertumbuhan serta pemerataan pembangunan dan ekonomi di seluruh daerah di Indonesia sebagai dampak kegiatan ekonomi masyarakat yang semakin lancar setelah program ini diimplementasikan. Oleh sebab itu, Laku Pandai diarahkan untuk dapat mem-provide berbagai produk jasa keuangan yang simpel, dapat dengan mudah dimengerti, dan dapat mengakomodir kebutuhan masyarakat. Keberadaan Laku Pandai dapat menjangkau hingga pedesaan, sehingga dapat meningkatkan aksesibilitas masyarakat terhadap layanan perbankan. Hal ini, sebagaimana teori pembangunan ekonomi yang diusung oleh Lewis, dapat membantu pertumbuhan masyarakat pedesaan yang berada pada kondisi subsisten agar dapat semakin berkembang.

Laku Pandai memiliki 3 (tiga) produk, yaitu tabungan dengan karakteristik Basic Savings Account (BSA), kredit untuk nasabah mikro, dan produk keuangan lainnya seperti asuransi mikro. Melalui program Laku Pandai, kedua pihak baik masyarakat maupun bank diharapkan dapat memperoleh berbagai manfaat. Misalnya, masyarakat dapat memilih produk tabungannya yang sesuai dengan kebutuhan dan kepentingannya seperti produk tabungan tanpa biaya administrasi sehingga masyarakat tidak perlu khawatir saldo berkurang, akan tetapi masih memperoleh bunga tabungan yang dijamin oleh LPS (Lembaga Penjamin Simpanan). Bank memperoleh manfaat berupa potensi meningkatkan brand image (OJK, 2016; Setiyono et al., 2021).

Kebijakan Laku Pandai telah diadopsi oleh seluruh wilayah daerah di Indonesia, termasuk Provinsi Sumatera Barat. Dengan adanya kebijakan Laku Pandai sebagai salah satu bentuk kebijakan inklusi keuangan di Provinsi Sumatera Barat, diharapkan masyarakat dapat lebih mudah mengakses layanan jasa keuangan sehingga dapat mendorong pengembangan dan peningkatan ekonomi lokal di Sumatera Barat. Berdasarkan data BI (2022), perekonomian Sumatera Barat mengalami pertumbuhan secara positif pada tahun 2021. Perekonomian Sumatera Barat tahun 2021 tumbuh sebesar 3,29%, diketahui mengalami peningkatan dibanding tahun 2020 yang kontraksi -1,62%. BI (2022) menyebutkan bahwa pertumbuhan tersebut didorong oleh semua komponen, terutama pada konsumsi rumah tangga, ekspor luar negeri, dan investasi.

Berbagai penelitian menunjukkan bahwa kebijakan Laku Pandai berdampak atau berpengaruh positif dalam peningkatan dan perkembangan perekonomian lokal masyarakat. Muniarty et al. (2019) dan Sastiono & Nuryakin (2019) dalam hasil penelitiannya menyebutkan bahwa inklusi keuangan melalui kebijakan Laku Pandai bernilai efektif dalam melayani kebutuhan masyarakat, terutama dalam mendorong pertumbuhan ekonomi mereka. Hal ini disebabkan karena program tersebut mempunyai keutamaan untuk menaikkan akses keuangan masyarakat yang tinggal di pedesaan dengan tingkat pendidikan dan pendapatan yang rendah. Selanjutnya, temuan Setiyono & Suharti (2021) menunjukkan bahwa kebijakan Laku Pandai memiliki pengaruh positif terhadap pertumbuhan modal masyarakat. Lebih jauh Al

Arif & Firmansyah (2018) dalam riset yang mengkaji efektivitas Laku Pandai oleh Bank BRI Syariah menemukan bahwa implementasi kebijakan Laku Pandai oleh Bank BRI Syariah memberikan hasil positif terhadap peningkatan deposit atau tabungan nasabah. Selain itu, Implementasi Laku Pandai juga dapat meningkatkan kapasitas dan pendapatan agen Laku Pandai dengan fee transaksi yang didapatkan masyarakat yang telah menjadi agen (Putra & Putera, 2022). Lebih lanjut, Agen BRILink juga berpengaruh pada hubungan sosial masyarakat yang membuat Agen BRILink menjadi sosok penting di tengah masyarakat (Putra et al., 2023).

Sebagai salah satu provinsi yang juga turut menerapkan Kebijakan Laku Pandai, kebijakan ini diharapkan juga dapat mendorong peningkatan perekonomian masyarakat di Provinsi Sumatera Barat. Oleh karena itu, dengan menggunakan teori dari Adiwidjaja (2019) berkenaan dengan faktor penting dalam pengembangan ekonomi lokal, maka penelitian ini diarahkan untuk menganalisis kebijakan Laku Pandai terhadap pengembangan ekonomi lokal di Sumatera Barat dengan studi kasus di Agen BRILink yang merupakan agen Laku Pandai dengan jumlah terbesar di Sumatera Barat yaitu mencapai 17.624 Agen posisi pada Juni 2022 (BRI RO Padang, 2022).

## METODE

Penelitian ini dirancang menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Penelitian kualitatif dilakukan untuk mempelajari keadaan objek alam, di mana peneliti adalah sarana utama penelitian. Pengumpulan data dilakukan dengan triangulasi, analisis data dilakukan secara induktif, dan hasil penelitian ditekankan pada deskripsi dan makna yang mendalam (Sugiyono, 2013). Pendekatan deskriptif merupakan metode riset yang terdiri atas proses koleksi berbagai data yang sesuai dengan tujuan penelitian dengan melibatkan aktivitas pengumpulan data mengenai status terbaru dari topik penelitian. Jenis studi deskriptif yang paling umum melibatkan penilaian sikap atau pendapat tentang individu, organisasi, keadaan, ataupun prosedur (Kuncoro, 2013).

Kegiatan riset ini dilaksanakan pada masyarakat yang menjadi Agen Laku Pandai yang dalam hal ini Agen BRILink, dimana data yang dipelajari berasal dari narasumber penelitian. Adapun lokasi penelitian dilakukan di Kota Padang dan Kabupaten Solok sebagai representatif kota dan kabupaten yang memiliki jumlah Agen BRILink yang terbesar serta memiliki wilayah yang termasuk di daerah urban, sub-urban dan rural. Selanjutnya teknik pengumpulan data didapatkan dari wawancara kepada 10 orang Agen BRILink dimasing-masing kota dan kabupaten tersebut untuk mendapatkan gambaran yang mendalam dari pertanyaan penelitian. Dengan menggunakan daftar pertanyaan terbuka untuk panduan wawancara mendalam, penelitian ini bermaksud untuk menganalisis kebijakan Laku Pandai terhadap pengembangan ekonomi lokal di Sumatera Barat.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Sumatera Barat merupakan salah satu daerah dengan sumber daya alam yang beragam seperti perkebunan, pertanian, serta pertambangan. Aktivitas ekonomi Sumatera Barat ditopang dari berbagai sektor seperti perdagangan, pertanian, perkebunan serta sektor lainnya. Sumatera Barat telah mulai menerapkan kebijakan Laku Pandai mulai dari tahun 2016 sejak kebijakan Laku Pandai diterbitkan. Salah satu Agen Laku Pandai yang

memiliki jumlah terbesar di Sumatera Barat adalah Agen BRILink yang merupakan binaan dari PT BRI (Persero) Tbk.

Salah satu yang diharapkan atas kebijakan Laku Pandai ini adalah dapat berkontribusi dalam pengembangan ekonomi lokal khususnya di Sumatera Barat. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa pengembangan ekonomi lokal ini diharapkan dapat memaksimalkan sumber daya lokal dalam rangka peningkatan ekonomi lokal setempat. Pentingnya ekonomi lokal ini disebabkan karena dapat menjadi momentum untuk memperoleh kesempatan diversifikasi lapangan pekerjaan serta dapat mendorong peningkatan pertumbuhan ekonomi suatu wilayah (Mudrajad, 2014). Selain itu, pengembangan ekonomi lokal juga bertujuan sebagai penggerak ekonomi daerah dalam rangka pengentasan kemiskinan, mengurangi pengangguran serta menggalakkan pembangunan yang berkelanjutan di tengah arus globalisasi ekonomi dengan berfokus pada kompetensi yang dimiliki daerah serta mengoptimalkan sumberdaya yang ada (Adiwidjaja, 2019).

Selanjutnya faktor yang dapat menunjukkan peran penting dari pengembangan ekonomi lokal ini menurut Adiwidjaja (2019) dapat dilihat antara lain sebagai berikut: (a) Perluasan peluang usaha, (b) Lapangan pekerjaan, (c) Pemeliharaan usaha, (d) Diversifikasi ekonomi, (e) Kemandirian, (f) Perluasan pajak bisnis dan sosial, (g) Kualitas hidup, (h) Pengakuan produk lokal, (i) Peningkatan daya saing. Berdasarkan kesembilan item di atas maka penulis dapat menjelaskan hasil analisis Kebijakan Laku Pandai terhadap pengembangan ekonomi lokal yang dilihat dari ke-sembilan item menurut Adiwidjaja di atas dengan hasil sebagai berikut:

### *Pengembangan Kesempatan Berusaha*

Dengan adanya Agen BRILink yang tersebar di pelosok daerah, bahkan sampai ke tingkat Rukun Warga (RW) atau Jorong, maka membuka kesempatan setiap masyarakat untuk mengembangkan usahanya. Hal ini terlihat dari Agen BRILink yang mulanya memiliki satu toko sembako, setelah menjadi Agen BRILink maka terdapat peningkatan pendapatan yang signifikan sehingga dapat membuka toko baru di wilayah lainnya dan sudah barang tentu dapat menambah lapangan kerja yang tersedia untuk mengelola tokonya yang lain. Berdasarkan hasil penelitian ditemukan bahwa peningkatan pendapatan ini diperoleh dari sharing fee 50%-50% dari fee layanan perbankan yang dilayani oleh Agen BRILink. Selain itu dengan adanya pencairan bantuan BPNT (Bantuan Pangan Non Tunai) di Agen BRILink, maka juga menambah perputaran barang-barang pangan yang biasanya menjadi stock yang cukup lama, sehingga terdapat peningkatan kapasitas usaha si Agen BRILink tadi (Robi Eka Putra, Roni Eka Putera, 2022). Selain itu, sebagai Agen Laku Pandai yang menawarkan produk perbankan seperti refferal tabungan, ternyata agen ini juga memiliki kesempatan untuk mendapatkan fee refferal ketika berhasil merefferalkan nasabah baru yang belum berbank menjadi berbank. Maka peningkatan penghasilan baik dari fee dan peningkatan penjualan inilah yang membuat kesempatan berusaha lebih berkembang bagi masyarakat.

### *Penyerapan Tenaga Kerja*

Seiring dengan tujuan pembangunan perekonomian untuk perbaikan pendapatan upah serta kesempatan bekerja bagi masyarakat di daerah, Agen BRILink merupakan salah satu produk kebijakan yang dapat memberikan kesempatan untuk penambahan lapangan pekerjaan baru bagi masyarakat setempat. Berdasarkan penelitian yang dilakukan, maka penambahan ini

tidak hanya terdapat pada usaha Agen BRILink itu sendiri, namun juga berdampak pada petani, peternak, distributor bahan pangan serta pihak-pihak yang terkait dengan Agen BRILink, terutama Agen BRILink yang dapat menyalurkan BPNT. Hal ini juga sebagai bentuk pemerataan ekonomi di daerah karena apabila Agen BRILink membutuhkan beras, maka akan ada petani beras yang akan diuntungkan, juga akan ada huller yang dibutuhkan. Apabila Agen BRILink menjual ikan, daging, dan ayam untuk penyaluran bantuan, maka terdapat peternak dan nelayan atau distributor daging yang diuntungkan karena terdapat kepastian dalam penjualan hasil produksi mereka setiap bulannya.

Agen BRILink yang memiliki usaha yang semakin besar tentu membutuhkan tambahan karyawan yang juga cukup besar. Sebagai contoh di Kota Padang yang memiliki lebih dari 100 Agen BRILink dengan transaksi besar telah berhasil mempekerjakan minimal 4 orang karyawan di toko mereka. Penambahan tenaga kerja itu baik untuk sebagai kasir yang mentransaksikan mesin EDC (Electronic Data Capture), maupun untuk tambahan tenaga akibat perluasan kapasitas usaha.

### *Retensi Bisnis*

Masyarakat cenderung berdomisili di daerah tertentu serta berkontribusi terhadap perekonomian daerah tersebut jika bisnis yang dilakukan dihargai oleh masyarakat (Adiwidjaja, 2019). Dengan menggeliatnya Agen BRILink yang melayani transaksi perbankan masyarakat di daerah serta semakin meningkatnya usaha yang dilakukan oleh mereka, maka terdapat suatu kepuasan berbisnis oleh pihak-pihak terkait seperti pemasok barang dagangan, produsen, bahkan pada masyarakat yang menerima pelayanan oleh Agen BRILink. Hal ini akan menyebabkan kerjasama terus menerus yang dilakukan antara pihak produsen, distributor, Agen BRILink serta masyarakat. Masyarakat yang membutuhkan untuk pencairan bantuan tentu memiliki kepastian untuk terus membeli bahan pangan sesuai ketentuan di Agen BRILink. Selain itu, para produsen dan distributor memiliki kepastian dalam hal produksi dan pendistribusian, oleh karena itu perputaran ekonomi di daerah tersebut akan membentuk suatu retensi yang terus terjaga selama tidak terdapat perubahan kebijakan oleh pemerintah.

### *Diversifikasi Ekonomi*

Dengan adanya pengembangan ekonomi lokal, maka diharapkan akan mengurangi ketergantungan masyarakat terhadap satu bidang usaha saja. Hal ini berdasarkan hasil penelitian dapat dilihat dari bervariasinya usaha yang dimiliki oleh Agen BRILink dimana terdiri dari para pedagang kelontongan bahan pangan, konter pulsa, BUMDES, penjual kue, bahkan pedagang pakaian dan pernak-pernik. Hal ini merupakan gambaran bahwa setiap usaha dan di bidang apapun memiliki kesempatan untuk menjadi Agen BRILink yang melayani transaksi perbankan dan mendapatkan fee tambahan untuk pendapatannya. Manfaat yang diperoleh juga memiliki diversifikasi pada semua lini pekerjaan seperti petani, pedagang, nelayan, BUMDES, penjahit, dan lain sebagainya.

### *Kemandirian*

Pelayanan publik terkait kesejahteraan masyarakat tidak akan terlalu tergantung kepada pemerintah dan aliansinya apabila memiliki basis ekonomi yang kuat. Hal ini dapat dilihat dari pengembangan ekonomi Agen BRILink yang ada di Sumatera

Barat yang menyebabkan perputaran ekonomi di Sumatera Barat dapat berkembang dengan terciptanya pola bisnis yang selalu berputar antara produsen, distributor, dan Agen BRILink. Masyarakat dapat berusaha memenuhi kebutuhannya sendiri melalui kerjasama dengan pihak lainnya sesuai bidang bisnis masing-masing. Di sini peran pemerintah pusatlah yang mengeluarkan dua kebijakan yang sangat berpengaruh yaitu kebijakan Laku Pandai dan kebijakan BPNT. Kebijakan pemerintah ini bukan membatasi masyarakat untuk ketergantungan, namun membuka peluang bagi masyarakat di daerah untuk dapat memanfaatkan kebijakan ini agar dapat menciptakan lapangan pekerjaan dan meningkatkan kapasitas usahanya masing-masing, salah satunya dengan menjadi agen Laku Pandai yang dalam hal ini menjadi Agen BRILink.

### *Perluasan Pajak Bisnis dan Sosial*

Kapasitas Agen BRILink yang mengalami peningkatan yang juga berdampak pada kapasitas pihak terkait di daerah masing-masing, membuat suatu kesempatan naik kelas terhadap Agen BRILink atau masyarakat sekitar. Sejalan dengan meningkatnya kapasitas usaha, maka semakin tinggi pendapatan yang diperoleh oleh Agen BRILink dan semakin besar kesadaran Agen untuk bisa membayar pajak untuk daerahnya. Hal ini terlihat dari hasil penelitian dimana sebelum kapasitas usaha yang berkembang, terdapat Agen yang belum memiliki NPWP, melakukan pengurusan NPWP. Hal ini selain kesadaran masing-masing, juga karena kebutuhan usaha mereka yang menyebabkan pembayaran wajib pajak karena pendapatan mereka yang meningkat. Sebagai contoh untuk pembayaran pajak penghasilan dan penambahan nilai dari penjualan barang Agen yang bergerak di bidang penjualan barang elektronik.

### *Kualitas Hidup*

Dengan meningkatnya pendapatan Agen BRILink dan pihak lainnya di suatu daerah, maka kualitas hidup mereka juga akan meningkat. Selain itu semakin bertambahnya kesadaran untuk membayar pajak, maka memiliki kesempatan peningkatan pendapatan pajak daerah yang juga akan dialokasikan untuk pembangunan daerah tersebut sehingga terdapat peningkatan infrastruktur jalan, sarana kesehatan, dan sara pendidikan. Oleh karena itu, kualitas hidup masyarakat setempat dapat meningkat diawali dengan peningkatan kapasitas Agen BRILink sebagai agen Laku Pandai di daerah tersebut.

### *Pengakuan Produk Lokal*

Pembangunan ekonomi lokal yang berhasil juga terlihat dari penjualan produk daerah yang mampu bersaing di wilayah sendiri, bahkan dapat dijual di luar daerah sampai luar negeri. Dalam mengaitkan produk lokal ini dengan Agen BRILink, maka didapatkan sampel agen yang memiliki usaha perdagangan yang kemudian meningkat kapasitasnya sehingga berkesempatan untuk melakukan ekspor bahan pertanian keluar daerah bahkan ke luar negeri. Agen BRILink ini juga mendapatkan bantuan modal dari Bank terkait untuk lebih meningkatkan kapasitas dan peningkatan kualitas produk yang disediakannya serta mendapatkan pelatihan pengembangan kapasitas usahanya.

### *Peningkatan Daya Saing*

Daya saing terlihat dari kemampuan masyarakat tersebut untuk dapat bertahan dan meningkatkan kemampuannya serta membentuk cluster usaha untuk meningkatkan daya saing. Hal

ini dapat terlihat dari pemberdayaan BUMDES serta kluster usaha yang menjadi Agen BRILink yang dapat melayani kebutuhan perbankan anggotanya. BUMDES yang memiliki usaha seperti simpan pinjam, serta penjualan barang pertanian dapat meningkatkan daya saing usahanya setelah menjadi Agen BRILink karena terbantu dalam peningkatan transaksi yang dilakukan melalui tools perbankan serta memiliki kesempatan pembiayaan dalam membuka usaha baru seperti pembukaan Pertashop yang berpotensi untuk meningkatkan kapasitas BUMDES dan Cluster usaha.

Selain itu, daya saing juga terlihat dari para produsen, serta pemasok barang pangan yang akan disalurkan oleh Agen BRILink untuk BPNT. Para pemasok dan produsen tentu akan meningkatkan kualitasnya untuk meningkatkan daya saing agar penjualannya terus meningkat, begitu juga Agen BRILink juga akan meningkatkan pelayanannya agar masyarakat terus bertransaksi di tempat mereka.

Berdasarkan penjelasan di atas, maka Kebijakan Laku Pandai yang diimplementasikan salah satunya melalui Agen BRILink telah menunjukkan kontribusinya dalam pengembangan ekonomi lokal dan daerah, hal ini terlihat dari tercapainya indikator penting dalam pengembangan ekonomi lokal sebagaimana penjelasan kesembilan item di atas.

## KESIMPULAN

Kebijakan Laku Pandai diharapkan dapat berimplikasi tidak hanya pada literasi keuangan, namun juga dapat berdampak lebih luas seperti pengembangan ekonomi lokal di daerah karena sebaran agen Laku Pandai yang tersebar luas. Agen BRILink adalah salah satu bentuk Agen Laku Pandai yang tersebar luas dengan jumlah yang besar. Di Sumatera Barat terdapat Agen BRILink sebesar 17.624 Agen yang tersebar dipelosok daerah di Sumatera Barat. Dengan jumlah Agen BRILink yang besar itu diharapkan dapat mengembangkan ekonomi lokal di daerah tersebut. Pentingnya ekonomi lokal ini disebabkan karena dapat menjadi momentum deversifikasi lapangan kerja baru serta mendorong pertumbuhan ekonomi di suatu daerah.

Sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan berdasarkan teori yang digunakan, maka didapatkan kesimpulan bahwa kebijakan Laku Pandai yang dikeluarkan pemerintah ternyata memiliki pengaruh pada pengembangan ekonomi lokal khususnya di Sumatera Barat. Hal ini terlihat dari peran penting pengembangan ekonomi lokal yang dapat dilihat setelah implementasi Agen BRILink dimulai pada tahun 2016. Peran penting yang dapat dilihat dan dirasakan seperti perluasan lapangan usaha, peningkatan lapangan kerja, perluasan usaha, diversifikasi ekonomi, swasembada, Perluasan pajak bisnis dan sosial, kualitas hidup, pengakuan produk lokal, dan peningkatan daya saing. Keseluruhan peran penting itu tentunya bukan hanya dirasakan oleh Agen BRILink, akan tetapi dirasakan juga oleh seluruh pihak dan lapisan di daerah agen tersebut berada. Oleh karena itu, kebijakan Laku Pandai di Sumatera Barat dapat disimpulkan telah berdampak signifikan bukan hanya pada inklusi dan literasi, namun juga berperan dalam pengembangan ekonomi lokal di Sumatera Barat.

## REFERENSI

Adiwidjaja, I. (2019). *Kebijakan Pembangunan Ekonomi: Kajian Sektor Publik, Lokal, Nasional, dan Regional*. Yogyakarta : Zahir Publishing.

- Al Arif, M. N. R., & Firmansyah, F. (2018). Laku pandai's program and deposit funds: study at Bank of BRI Sharia. *Jurnal Ekonomi*, 23(1).
- BRI RO Padang. (2022). Data Jumlah Agen BRILink di Sumatera Barat.
- Kuncoro, M. (2013). *Metode Kuantitatif: Teori dan Aplikasi untuk Bisnis dan Ekonomi*. Yogyakarta : UPP-AMP YKPN.
- Kusumawati, A. (2015). *Tanggung Jawab Agen kepada Nasabah Penyimpan dan Simpanannya terhadap Layanan Perbankan*. Tesis, Universitas Brawijaya.
- Kurniawati, E., & Sugiyanto, C. 2021. Pengaruh Struktur Umur Penduduk terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia. *Jurnal Ekonomi dan Pembangunan Indonesia*, 21(1). 41-58.
- Lestari, N., Pasha, P. A., Oktapianti, M., Oktariani, N., & Noviarita, H. H. (2021). *TEORI PEMBANGUNAN EKONOMI (Vol. 2, Issue 2)*.
- Mudrajad, K. (2014). *Otonomi Daerah: Menuju Era Baru Pembangunan Daerah*. Erlangga.
- Muniarty, P., Nurhayati, & Ita Purnama. (2019). Analisis Laku Pandai (Branchless Banking) Pada Agen Perbankan (Studi Di Kota Bima) Puji Muniarty 1) , Nurhayati 2) , Ita Purnama 3) *Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Bima Informasi Artikel Abstrak Jurnal Mitra Manajemen (JMM Online)*.
- OJK. (2016). Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 76 /Pojk.07/2016 Tentang Peningkatan Literasi Dan Inklusi Keuangan Di Sektor Jasa Keuangan Bagi Konsumen Dan/Atau Masyarakat.
- OJK. (2021). *Strategi Nasional Literasi Keuangan Indonesia (SNLKI) 2021 - 2025*. Ojk.Go.Id. <https://www.ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/publikasi/Pages/Strategi-Nasional-Literasi-Kuangan-Indonesia-2021-2025.aspx>.
- Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 82 tahun 2016 tentang Strategi nasional Keuangan Inklusif.
- Peraturan Presiden RI No. 114 Tahun 2020, tentang Strategi Nasional Keuangan Inklusi.
- Putra, R. E., Putera, R. E., & Aromatica, D. (2022). Implementasi Kebijakan Penyaluran BPNT Melalui E-warong Versus PT Pos Indonesia Di Kota Padang. *Sawala Jurnal Administrasi Negara*, 10(2), 266–280.
- Putra, R. E., & Putera, R. E. (2022). Evaluasi e-Warong sebagai Upaya Pengentasan Kemiskinan di Kota Padang. *Journal of Social and Policy Issues Vol 2. No. 1*, 21-26.
- Putra, R. E., Putera, R. E., & Aromatica, D. (2023). Peran agen brilink sebagai program kebijakan inklusi keuangan. *Jurnal Kebijakan Publik*, 14(1), 85–91.
- Sastiono, P., & Nuryakin, C. (2019). Inklusi Keuangan Melalui Program Layanan Keuangan Digital dan Laku Pandai Financial Inclusion: Case Study of LKD and Laku Pandai Program. *Jurnal Ekonomi Dan Pembangunan Indonesia*, 19(2), 242–262.
- Setiyono, T. A., Hidayatullah, S. K., Bank, S., & Jateng, B. P. D. (2021). Analisis Tren Pertumbuhan Fee Based Income (FBI) dan Interst Based Income ( IBI ) di Masa Pandemi Covid-19. 20(2), 170–181.
- Setiyono, T. A., & Suharti, S. (2021). Analisis Pengaruh Program Laku Pandai Terhadap Pertumbuhan Dana Pihak Ketiga (DPK). *Jurnal Akuntansi* 9(1).
- Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Kualitatif Kuantitatif dan R & D*. Bandung : Alfabeta
- Supartoyo, yesi hendriani, Juanda, B., Firdaus, Muhammad, & Effendi, J. (2018). *Kajian Ekonomi & Keuangan*. 2.